

BAB III

TINJAUAN WILAYAH LABORATORIUM BADAN LINGKUNGAN HIDUP DI BANTUL

3.1. Tinjauan Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau Jawa. Di sebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah utara menjulang Gunung Merapi (± 2.968 m), salah satu dari gunung yang paling aktif di dunia. Luas keseluruhan Provinsi DIY adalah 3.185,80 km² atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Di sebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari Jawa Tengah, dan Sungai Opak di sebelah timur yang berawal dari Gunung Merapi yang bermuara di laut selatan.

Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota-kota lainnya adalah Bantul, Wates, Sleman dan Wonosari. Secara administratif DIY dibagi dalam satu kota dan empat kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan administrasi sendiri. Jarak ke ibukota Negara Jakarta, adalah 600 km kota-kota besar yang paling dekat adalah Semarang di Jawa Tengah (120 km) dan Surabaya di Jawa Timur (320 km).

Dengan Tata wilayah yang dekat dengan beberapa kota di Jawa Tengah juga memacu kepadatan melalui transmigrasi tiap tahunnya, ditambah juga dengan pertumbuhan di kota Yogyakarta yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk ini juga bisa memicu dampak kerusakan alam. Berdasarkan jumlah penduduk yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat seperti table 3.1 mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2006 sampai 2010.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Region	Kategori	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2010	2009	2008	2006
Bantul	Jumlah Pria (jiwa)	454.491	-	414.046	402.970
	Jumlah Wanita (jiwa)	457.012	-	428.010	417.571
	Total (jiwa)	911.503	-	842.056	820.541
Gunungkidul	Jumlah Pria (jiwa)	326.703	334.519	335.013	328.002
	Jumlah Wanita (jiwa)	348.679	353.626	351.759	355.442
	Total (jiwa)	675.382	688.145	686.772	683.444
Kulonprogo	Jumlah Pria (jiwa)	190.694	-	181.470	183.464
	Jumlah Wanita (jiwa)	198.175	-	193.313	190.376
	Total (jiwa)	388.869	-	374.783	373.840
Sleman	Jumlah Pria (jiwa)	547.885	-	532.905	521.170
	Jumlah Wanita (jiwa)	545.225	-	507.315	487.094
	Total (jiwa)	1.093.110	-	1.040.220	1.008.264
Yogyakarta	Jumlah Pria (jiwa)	189.137	-	220.827	214.526
	Jumlah Wanita (jiwa)	199.490	-	236.088	227.683
	Total (jiwa)	388.627	-	456.915	442.209
Total	Jumlah Pria (jiwa)	326.703	334.519	335.013	402.970
	Jumlah Wanita (jiwa)	348.679	353.626	351.759	417.571
	Total (jiwa)	675.382	688.145	686.772	820.541

Sumber Data: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011

Berdasarkan tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut terdapat dua alternatif yaitu sleman dan Bantul. Sleman dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 1.093.110 jiwa dan pada Kabupaten Bantul pada tahun 2010 sebesar 911.503 jiwa. Bila di lihat lebih rinci lagi perkembangan pada Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai 2010 adalah 1.008.264 jiwa pada tahun 2006 dan 1.093.110 jiwa pada tahun 2010 sehingga peningkatan jumlah penduduk sebesar 84.846 jiwa, sedangkan pada daerah Kabupaten Bantul jumlah penduduk daerah pada tahun 2006 sebesar 820.541 jiwa dan pada tahun 2010 sebesar 911.503 jiwa sehingga peningkatan penduduk sebesar 90.962 jiwa. bila dilihat maka dapat ditentukan pada Kabupaten Sleman dan juga

Sleman merupakan wilayah perkembangan paling pesat dibandingkan dengan daerah Kabupaten Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Kulon Progo.

Berdasarkan data kepadatan penduduk yang meningkat diperlukan suatu wadah pengawasan langsung dari pemerintah untuk menekan dampak kerusakan alam. Berdasarkan keputusan presiden tentang penanganan kerusakan alam maka Badan lingkungan hidup yang dilengkapi dengan fasilitas laboratorium lingkungan untuk membantu tugas utama sebagai badan pengawasan langsung yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian dampak kerusakan alam. Berdasarkan data kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada kota Yogyakarta sendiri memiliki tiga laboratorium yang tersebar di lima kecamatan yaitu

Tabel 3.2 Daftar keberadaan laboratorium lingkungan di Yogyakarta

No	Kabupaten	Keterangan
1	Kabupaten Bantul	-
2	Kabupaten Gunung Kidul	-
3	Kabupaten Kulon Progo	-
4	Kabupaten Sleman	2 buah
5	Kabupaten Yogyakarta	1 buah

Sumber: Kementerian Badan Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Dilihat dari tabel terlihat terdapat dua laboratorium lingkungan yang berada di kabupaten/kota sleman dan satu laboratorium yang terakreditasi yang berada di kabupaten/kota Yogyakarta, maka diperlukan laboratorium tambahan yang berada di kabupaten/kota gunung kidul, Bantul dan Kulon Progo.

Berdasarkan Tabel keberadaan Laboratorium Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi dari lima (5) Kabupaten dapat disimpulkan daerah Bantul belum memiliki laboratorium lingkungan, sehingga perlu suatu wadah untuk menekan dampak kerusakan lingkungan yang berhubungan langsung dengan sistem pengawasan langsung yang membantu pemerintah daerah setempat untuk menangani masalah lingkungan.

3.2. Tinjauan Umum Kabaupaten Bantul

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima Kabupaten dan satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan (*sumber: www.bantulkab.go.id, diakses pada 3 oktober 2012*).



Gambar 3.1 Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul
sumber: www.bantulkab.go.id, diakses pada 3 oktober 2012

3.2.1. Kondisi Geografis

3.2.3.1. Letak Wilayah

Kondisi Geografis Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia (*sumber: www.bantulkab.go.id, diakses pada 3 oktober 2012*).

3.2.3.2. Kondisi Geologis

Kondisi Geologis: Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas dan hubungan kelas kemiringan/lereng dengan luas sebarannya. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%). Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan.

Tabel 3.3. Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah
Kabupaten Bantul Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Kemiringan tanah / lereng (Ha)						Jumlah
		0 -2%	2 - 8%	8 - 15%	5 - 25%	15 - 40%	> 40%	
1.	Srandakan	1.680	154	0	0	0	0	1.834
2.	Sanden	2.100	227	0	0	0	0	2.327
3.	Kretek	1.756	288	0	27	11	468	2.550
4.	Pundong	1.395	171	0	90	108	612	2.376
5.	Bambanglipuro	2.210	72	0	0	0	0	2.282
6.	Pandak	2.123	306	0	0	0	0	2.429
7.	Pajangan	865	661	990	162	394	247	3.319
8.	Bantul	2.184	0	0	15	0	0	2.199
9.	Jetis	2.305	81	0	144	0	30	2.560
10.	Imogiri	1.768	585	279	900	954	1.295	5.781
11.	Dlingo	72	1.993	268	572	1.433	1.296	5.634
12.	Banguntapan	2.629	0	0	0	0	0	2.629
13.	Pleret	704	431	365	55	547	26	2.128
14.	Piyungan	2.187	702	0	0	423	0	3.312
15.	Sewon	2.668	0	0	8	0	0	2.626
16.	Kasih	2.312	0	598	182	161	35	3.238
17.	Sedayu	2.513	227	300	138	233	0	3.411
	Jumlah	31.421	5.898	2.800	2.293	4.264	4.009	50.685

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2012

3.2.3.3. Kemampuan Tanah

Kemampuan Tanah: Kondisi fisik tanah yang digunakan untuk menyusun kemampuan tanah pada dasarnya mengacu pada kondisi lahan pada umumnya. Kondisi lahan yang digunakan untuk mengukur kemampuan tanah adalah kemiringan lereng, kedalaman efektif tanah, kelas drainase, tekstur tanah, dan kelas erosi tanah. Berdasarkan kriteria tersebut maka lahan yang baik adalah apabila lahan mempunyai lereng datar, kedalaman efektif tanah dalam, drainase baik, tekstur tanah sedang, dan tidak ada erosi.

Tinggi tempat Berdasarkan elevasi lahan daratan dari permukaan air laut ketinggian tempat atau elevasi dapat ditentukan, di mana permukaan air laut dianggap mempunyai elevasi 0 meter. Ketinggian tempat Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada Peta Ketinggian Tempat. Berdasarkan ketinggian tanah dapat dilihat dari table 3.4 ketinggian wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan luas dan ketinggian wilayah.

Tabel 3.4 Ketinggian Wilayah Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Luas dan Ketinggian tempat (dpl)					Luas (Ha)
		0 - 7 m	7 - 25 m	25 -100 m	100 - 500 m	>500 m	
1.	Srandakan	1.058	776	0	0	-	1.834
2.	Sanden	1.246	1.081	0	0	-	2.327
3.	Pundong	0	1.938	239	199	-	2.376
4.	Bambanglipuro	0	1.494	788	0	-	2.282
5.	Pandak	0	1.312	1.117	0	-	2.429
6.	Pajangan	0	221	2.646	452	-	3.319
7.	Bantul	0	0	2.199	0	-	2.199
8.	Jetis	0	0	2.549	11	-	2.560
9.	Imogiri	0	0	815	4.819	-	5.634
10.	Dlingo	0	0	2.154	475	-	2.629
11.	Pleret	0	0	1.783	345	-	2.128
12.	Piyungan	0	0	1.965	1.347	-	3.312
13.	Banguntapan	0	0	2.676	0	-	2.676
14.	Sewon	0	0	2.608	630	-	3.238
15.	Kasih	0	0	3.262	149	-	3.411
16.	Sedayu	0	791	2.718	2.272	-	5.781
	Jumlah	3.228	8.948	27.709	10.800	-	50.685

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2012

Berdasarkan tabel 3.4 Kelas ketinggian tempat yang memiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25 100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Ketinggian wilayah per kecamatan di Kabupaten Bantul Kecamatan Srandakan dan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2% dari seluruh luas kabupaten).

3.2.3.4. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam: Kabupaten Bantul selain mempunyai keunggulan di sektor pertanian juga memiliki potensi dengan sumber daya alamnya (SDA). Bahan tambang yang ada meliputi pasir/kerikil, tanah liat, batu putih/batu gamping, kalsit, breksi, batu apung, mangan, andesit, tras, bentonit, dan pasir besi.

Di Kecamatan Dlingo memiliki Khusus bahan galian mangan (bahan galian Golongan B) dengan cadangan yang relatif sedikit dan tidak berpotensi untuk ditambang. Pertambangan bahan galian di Kabupaten Bantul umumnya ditambang oleh masyarakat setempat dengan menggunakan ijin SIPR, akan tetapi sampai saat ini banyak penambangan yang tidak berijin. Berdasarkan data pada yang masuk maka jumlah usaha penggalian bahan tambang dari tahun 2007 sampai tahun 2008 mengalami kenaikan. Bahan galian yang telah diusahakan adalah tanah liat sebagai bahan pembuatan bata merah, gerabah, dan keramik serta digunakan sebagai bahan urug.. Sedangkan Breksi batu apung telah dimanfaatkan sebagai bahan pondasi ringan, ornamen/partisi, breksi “cone”, dan barang kerajinan. Bahan galian yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Pasir besi yang terdapat di kawasan pantai dan dalam penambangannya, perlu perhatian khusus pada aspek lingkungan.

3.2.3.5. Tata Guna Lahan

Dalam melaksanakan pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut merupakan salah satu upaya perencanaan program pembangunan yang memperhatikan suatu tatanan wilayah yang terpadu dan teratur.

Secara garis besar arah pengembangan dan pembangunan daerah mengacu pada RTRW Kabupaten Bantul yang terbagi menjadi enam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Sedangkan peta Satuan Wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tata Guna Lahan

No	Wilayah	Tata Guna Wilayah
1	Srandakan	a. Jalur Pansela b. Pengembangan Wisata Bahari di Sepanjang Pantai Selatan c. Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut d. Pengembangan Energi Terbarukan dan Konversi energi e. Pengembangan Desa Mandiri energi
2	Sanden	a. Jalur Pansela b. Pengembangan Wisata Bahari di Sepanjang Pantai Selatan c. Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut d. Pengembangan Agrowisata
3	Kretek	a. Jalur Pansela b. Pengembangan Destinasi wisata c. Pengembangan Wisata Bahari di Sepanjang Pantai Selatan d. Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut e. Konversi Gumuk Pasir
4	Pundong	a. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan b. Pengembangan Destinasi Wisata c. Peningkatan Pelayanan Fasilitas Wisata dan Akomodasi
5	Bambanglipuro	a. Pengembangan Pertanian / lahan pertanian berkelanjutan b. Pengembangan Bio Energi c. Pengembangan Bio Arang / Bio Sampah
6	Pandak	a. Pengembangan Kawasan Minapolitan b. Pengembangan Pertanian /Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Mengendalikan Kegiatan pada Cagar Budaya d. Pengembangan Bio Energi
7	Bantul	a. Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya dan Kerajinan pada Desa Wisata Gabusan - Manding - Tembi (GMT) b. Permasalahan Sanitasi Perkotaan c. Pengembangan Bio Arang / Bio Sampah

No	Wilayah	Tata Guna Wilayah
8	Jetis	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan b. Pengembangan Pertanian /Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Pengembangan Microhydro d. Pengembangan Destinasi Wisata
9	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Agrowisata b. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan
10	Dlingo	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Agrowisata b. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan
11	Pleret	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan Kegiatan Pada Cagar Budaya b. Pengembangan Destinasi Wisata c. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan
12	Piyungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Industri b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Regional Lintas Kab/Kota c. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan d. Pengembangan Desa Mandiri Energi
13	Banguntapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan yogyakarta / KPY (Kaw. Strategis Ekonomis) b. Perubahan Penggunaan Lahan (Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian) c. Permasalahan Perbatasan dan Sanitasi Perkotaan
14	Sewon	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan yogyakarta / KPY (Kaw. Strategis Ekonomis) b. Perubahan Penggunaan Lahan (Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian) c. Pengolah Air Limbah (IPAL) Sewon Regional Lintas Kab/Kota d. Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya dan Kerajinan Pada desa e. Gabusan - Manding -Tembu (GMT) f. Permasalahan Perbatasan dan Sanitasi Perkotaan
15	Kasih	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan yogyakarta / KPY (Kaw. Strategis Ekonomis) b. Perubahan Penggunaan Lahan (Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian) c. Pengembangan Desa Wisata Cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi) d. Permasalahan Perbatasan dan Sanitasi Perkotaan
16	Pajangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Bantul Kota Mandiri b. Mengendalikan Kegiatan Pada Cagar Budaya
17	Sedayu	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Desa Mandiri Energi b. Pengembangan Bio arang / Bio sampah c. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Industri

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2012

Untuk mendukung program kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka tiga kecamatan telah dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, yaitu Kecamatan Piyungan, Pundong, dan Srandakan. Selain penataan wilayah seperti tersebut di atas, pembangunan di Kabupaten Bantul juga mengacu pada Perda No. 01 tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Bantul yang menunjukkan pemanfaatan ruang wilayah. Pembagian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Budidaya Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kawasan Lahan Basah Non Irigasi;
 - b. Kawasan Lahan Basah Irigasi;
 - c. Kawasan Pertanian Lahan Kering.
2. Budidaya Non Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kawasan Industri;
 - b. Kawasan Perumahan Baru;
 - c. Kawasan Perkotaan;
 - d. Kawasan Pariwisata;

3.2.2. Kondisi Klimatologis

Data curah hujan disajikan sebagai perbandingan adalah data pada tahun 2008 dan 2009. Untuk mengetahui pola curah hujan pada suatu wilayah tertentu diperlukan parameter data minimal berupa banyaknya hari hujan dan intensitas curah hujan yang secara spasial tertuang dalam Peta Intensitas Curah Hujan Tahunan. Akan tetapi untuk keperluan analisis pola curah hujan akan lebih tepat apabila menggunakan data yang diambil dalam kurun waktu sedikitnya lima tahun yang berurutan.

Tabel 3.6 Pola Curah Hujan Tahun 2011 dan 2012

No	Bulan	2011		2012	
		HH	mm	HH	mm
1.	Januari	31	64,93	17,50	188,00
2.	Februari	29	365,59	12,60	194,80
3.	Maret	31	350,54	10,17	109,50
4.	April	21	163,54	10,38	129,25
5.	Mei	7	20,25	0	0
6.	Juni	1	4,41	1,67	45,67
7.	Juli	0	0	2,00	0
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	0	0	0	0
10.	Oktober	19	162,97	0	0
11.	November	27	372,15	8,00	192,20
12.	Desember	27	276,33	10,43	225,71
	Jumlah	193	1780,71	72,74	1089,13
	Rata-rata	16,08	148,39	6,06	90,76

Sumber : Dipertahut Kabupaten Bantul, 2012

Berdasarkan tabel 3.5 Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan (tabel 3.6). Berdasarkan RDTRK dan Perda mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 3.7 Suhu Kecamatan Bantul

No	Kecamatan	Suhu(0c)	
		Maksimal	Mininimal
1.	Srandakan	37	22
2.	Sanden	35	25
3.	Kretek	32	28
4.	Pundong	30	24
5.	Bambanglipuro	32	23
6.	Pandak	20	32
7.	Pajangan	32	23
8.	Bantul	32	23
9.	Jetis	30	25
10.	Imogiri	36	23
11.	Dlingo	32	24
12.	Banguntapan	37	24
13.	Pleret	34	22
14.	Piyungan	32	23
15.	Sewon	30	25
16.	Kasih	34	22
17.	Sedayu	32.5	24.5
Jumlah		32.20	24.26

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul, 2012

Berdasarkan tabel 3.7 Kecamatan Banguntapan dan serandakan mempunyai suhu maksimum paling tinggi dibanding kecamatan lainnya yaitu 37 C. Sedangkan besaran suhu minimum kecamatan Bantul paling rendah berdasarkan tabel 3.6 yaitu Pleret dan kasihan hingga mencapai 22 C. Bila dilihat dari keseluruhan kecamatan dapat dilihat bahwa suhu di daerah kabupaten Bantul yang terletak di daerah pegunungan menjadikan daerah kabupaten Bantul mencapai suhu yang saat dingin pada saat malam hari.

3.2.3. Kondisi Sosial-Ekonomi-Budaya

3.2.3.1. Kependudukan

Kondisi sosial-budaya-ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan keadaan lingkungan yang berkaitan langsung dengan kondisi tapak seperti sejarah dan jumlah keberadaan penduduk yang berada di kecamatan Bantul.

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Srandakan	14.168	14.414	25.582
2.	Sanden	14.551	15.085	29.636
3.	Kretek	14.063	15.072	29.135
4.	Pundong	15.453	16.150	31.603
5.	Bambanglipuro	18.414	18.897	37.311
6.	Pandak	23.793	23.881	47.674
7.	Bantul	29.458	29.776	59.234
8.	Jetis	25.710	26.217	51.927
9.	Imogiri	25.755	28.396	56.151
10.	Dlingo	17.529	18.013	35.542
11.	Pleret	21.626	21.559	43.185
12.	Piyungan	24.262	24.384	48.646
13.	Banguntapan	60.870	59.253	120.123
14.	Sewon	52.722	51.446	104.168
15.	Kasih	55.320	55.107	110.427
16.	Pajangan	16.282	16.528	32.810
17.	Sedayu	22.005	22.413	44.418
	Jumlah	453.981	456.591	910.572
	Presentase	49,86	50,14	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2012

Berdasarkan tabel 3.7 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa kecamatan Bangun tapan memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu 129.000 jiwa dengan jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan ialah 60.870 jiwa dan 59.253 jiwa. Bila dilihat lagi pada tabel 3.7 jumlah paling sedikit dipegang oleh kecamatan Sradakan dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 25.582 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 14.168 jiwa dan penduduk berjenis kelamin wanita sebesar 14.414 jiwa.

3.2.3.2. Sejarah Wilayah

Sejarah Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

3.2.4. Kondisi Sarana-Prasarana yang Relevan

3.2.4.1. Sarana Pendidikan

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bantul adalah pada sektor pendidikan. Sarana pendidikan yang memadai akan dapat memacu peningkatan kualitas dari Sumber Daya Manusia terutama bagi generasi muda. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam menjelang dan menghadapi era globalisasi, terutama menghadapi pasar bebas. Peningkatan mutu SDM diharapkan pula bersamaan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki SDM. Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bantul mulai dari pendidikan non-formal (PAUD dan TK) sampai dengan perguruan tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta kursus-kursus ketrampilan yang semakin banyak berkembang di Bantul.

Tabel 3.9. Jumlah Sekolah Tahun 2007 - 2010

No	Jenjang	Perkembangan Jumlah Sekolah Tahun (buah)			
		2007	2008	2009	2010
1	SD / MI	372	372	372	376
2	SMP / MTs	106	106	107	97
3	SMA / MA	43	42	43	44
4	SMK	34	36	36	37

Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan NF, Mei 2011

Berdasarkan tabel 3.8 jumlah sekolah tahun 2007-2010 dapat dilihat bahwa jumlah SD/ MI mengalami peningkatan pada tahun 2010 dengan ketambahan 4 buah sekolah bertaraf sekolah dasar. Pada tahap jenjang SMP/MTs mengalami penurunan atau penutupan fasilitas pada tahun 2010 yaitu sebesar 9 buah sekolah SMP/MTs, dan pada tahun 2009 hanya mengalami penambahan 1 buah sekolah. Sementara itu pada tingkat SMA mengalami peningkatan atau ketambahan 1 buah sekolah menengah atas. Sementara pada tingkat SMK mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 34 buah pada tahun 2007 hingga 37 buah pada tahun 2010.

Tabel 3.10 Kondisi Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2010

No	Jenjang	Jumlah Sekolah (buah)		Jumlah Siswa (jiwa)	Jumlah Guru (jiwa)	Jumlah Guru Sertifikasi (jiwa)
		Negeri	Swasta			
1	SD/MI	276	100	74.010	5.426	3.253
2	SMP/MTs	53	54	34.661	3.072	2.680
3	SMA / MA	22	22	13.844	1.672	711
4	SMK	13	24	13.934	1.517	537

Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2011

Berdasarkan Tabel 3.10 Kondisi Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2010 jumlah siswa yang duduk dibangu SD/MI memiliki jumlah siswa yang besar yaitu 74.010 jiwa, pada SMP/MTs sebesar 34.661 jiwa dan pada SMA/MA sebesar 13.844, SMK sebesar 13.934 jiwa. Sedangkan pada jumlah sekolah bannyaknya sekoah negeri berbanding sama dengan jumlah sekolah swasta namun pada tingkat SD/MI dan pada tingkat SMK mengalami jumlah yang berbeda yaitu pada SD/MI jumlah swasta lebih sedikit dibandingkan sekolah Negeri yaitu 100 buah sekolah swasta dan 276 buah sekolah negeri. Sementara pada jumlah pengajar yang sudah bersertifikasi dibandingkan

jumlah guru total dapat dilihat bahwa sekitar 2.173 jiwa pengajar yang belum bersertifikasi pada tingkatan SD/MI.

Tabel 3.11 Daftar Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Th. 2011

No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat	Lokasi Desa
1.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)	Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul	Tamantirto
2.	Institut Seni Indonesia (ISI)	Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak pos 1210 Yogyakarta 55001	Panggunharjo
3.	Universitas Mercu Buana	Jl. Wates Km 10 Yogyakarta 55753	Argomulyo
4.	STTL 'YLH'		Janti
5.	STKIP Catur Sakti	Jl. Wahidin Sudirohusodo Bantul 55813	Trirenggo
6.	Universitas PGRI	Jl. PGRI I, Sonosewu No.117 PO BOX 1123	Sonosewu
7.	Akademi Kebidanan Yogyakarta	Jl.Parangtritis Km.6	
8.	STIKES Wira Husada		Jaranan
9.	STMIK AKAKOM		Janti, Kr.Jambe
10.	STIE Kerjasama		Salakan
11.	ASMI Yogyakarta		Krapyak
12.	AKK Manggala		Sukowaten
13.	STISIPOL Kartika Bangsa	Jl.Gedong Kuning	
14.	STTKD		Sewon
15.	STIE YKP		Tambak,Jl Godean
16.	ASMI Desanta		Bayeman,Jl Wates
17.	Akademi Pariwisata Stipary	Jl.Jogja-Wonosari Km.6	Ketandan
18.	Akademi Teknik PIRI	Jl.Gedong Kuning	
19.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati	Ngrukem RT 10 Pendowoharjo Sewon Bantul	
20.	Akademi Teknologi Kulit	Jl. Ateka, Bangunharjo, Sewon, Bantul 55187	
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati	Jl. Lowanu No.31	
22.	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD)	Jl. Parangtritis Km. 4,5 Sewon, Bantul	
23.	Sekolah Tinggi Al-Qur'an An-Nur	Jl. Laksda Adisucipto Km 6,3	

Sumber: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2011

3.2.4.2. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan merupakan salah satu sarana yang vital yang terdapat di Kabupaten Bantul. Sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik atau Balai Pengobatan, BKIA, Dokter dan Bidan Praktek Swasta, Posyandu, apotek dan laboratorium. Banyaknya sarana kesehatan di suatu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat. Sarana penunjang lainnya dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul adalah persediaan obat dengan jumlah relatif mencukupi .

Tabel 3.12 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2009 (Buah)	2010 (Buah)
1	Rumah Sakit Umum	5	9
2	Rumah Sakit Bersalin	3	0
3	Rumah Sakit Khusus (KIA, Bedah, Paru)	2	3
4	Balai Pengobatan	66	78
5	Rumah Bersalin	27	32
6	Apotek	72	100
7	Industri Peracik Batra	9	13
8	Laboratorium	0	4
9	Optik	0	4
10	Puskesmas Rawat Inap	16	16
11	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11
12	Puskesmas Pembantu	67	67
13	Puskesmas Keliling	27	27

Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

Menurut tabel Tabel 3.11 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum dapat dilihat secara umum bahwa jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2009 hingga 2010 mengalami peningkatan jumlah unit dilihat dari jumlah unit yang sudah ada yaitu rumah sakit umum mengalami peningkatan dari 5 buah pada tahun 2009 dan 9 buah pada tahun 2010, dan pada balai pengobatan mengalami peningkatan dari 66 buah pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 terdapat 78 buah balai kesehatan. Bila dilihat secara umum bisa disimpulkan bahwa tiap tahunnya jumlah fasilitas kesehatan mengalami peningkatan.

Tabel 3.13 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bantul

No	Jenis	2009 (Jiwa)	2010 (Jiwa)
1	Dokter Spesialis	21	62
2	Dokter Umum	94	282
3	Dokter Gigi	61	82
4	Apoteker	9	146
5	Bidan	256	339
6	Perawat	319	679
7	Farmasi	36	54
8	Gizi	39	61
9	Teknis Medis	75	46
10	Sanitasi	54	1
11	Kesmas	33	44

Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

Pada Tabel 3.12 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum dapat dilihat jumlah tenaga medis terus meningkat dari tahun 2009 sampai 2010 yakni diantaranya adalah dokter spesialis dari 2 jiwa hingga 62 jiwa pada tahun 2010, 94 jiwa hingga mencapai 282 jiwa pada dokter umum, dokter gigi dari 68 jiwa hingga 82 jiwa pada tahun 2010, apoteker dari 9 jiwa sampai 146 jiwa, bidan 256 jiwa sampai 339 jiwa pada tahun 2010.

Tabel 3.14 Data Jaminan Kesehatan

No	Jenis Jaminan	Jumlah Peserta (Jiwa)	Penyelenggara	Biaya Sumber Premi
1	Jamkesmas	222.987	Kemenkes RI	Pemerintah RI
2	Jamkesos	98.086	Pemprov. DIY	Pemprov. DIY
3	Askes PNS	83.573	PT. Askes	PNS & Pemerintah
4	Jamsostek	9.537	PT. Jamsostek	Pegawai & Perush.
5	Asabri	5.240	Pt. Asabri	ABRI & Pemerintah
6	Askes Komersial	6.893	Asuransi Swasta	Masyarakat

Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

Pada tabel 3.13 Data Jaminan Kesehatan dapat dilihat jumlah yang sudah mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yaitu sekitar 222.987 jiwa yang bernaung dibawah Jamkesmas, 98.086 jiwa pada Jamkesos, 83.573 jiwa pada Askes PNS, 9.537 jiwa pada Jamsostek, 5.240 jiwa pada Asabri, dan 6.893 jiwa pada Askes Komersial.